



Ragukan Hanya Dua Soal Bocor

- Sarang Lidi Minta Guru Pembocor Disanksi Pidana
- ASPD Tak Jadi Syarat SPMB Jadi Buah Simalakama

JOGJA - Ketua Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) DIJ yang juga Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) Yuliani Putri sangsi kebocoran soal asesmens standarisasi pendidikan Dldaerah (ASPD) hanya terjadi pada dua soal. Guru pembocor pun diminta dihsanksi ■

Baca **Ragukan...** Hal 3



FAHMI FAHRIZA/RADAR JOGJA

YULIANI PUTRI

Ketua Sarang Lidi DIJ,
Koordinator AMPPY



Itu kan dari sistem, rasanya tidak mungkin hanya dua soal yang bocor."



Ragukan Hanya Dua Soal Bocor

Sambungan dari hal 1

Yuliani menyampaikan, tidak sepenuhnya meyakini kebocoran soal yang terjadi hanya ada dua soal, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ, Suhirman. "Itu kan dari sistem, rasanya tidak mungkin hanya dua soal yang bocor," katanya pada *Radar Jogja*, Sabtu (10/5).

Sementara, menyoal oknum yang membocorkan soal,

menurutnya juga perlu mendapat sanksi yang tegas. "Menurut saya ini yang membobol harus dipidana, apalagi kalau guru, harusnya punya etika," serunya.

Dia juga menyoroti keamanan server soal di Disdikpora. Dia meminta diselidiki lebih lanjut. Termasuk juga akses terhadap soal tersebut. Yuliani menyebut, dinas sendiri salah besar karena keamanan soal itu tidak terjamin. "Kalau IT atau keamanannya tidak mumpuni,

harusnya pakai sistem keamanan yang lebih mumpuni," ungkapnya.

Selain evaluasi pada pengamanan soal, ia juga menyoroti perlu adanya tim independen yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri untuk membuat soal-soal tersebut. Menurut dia, seharusnya ada tim independen sendiri, yang tidak harus dari sekolah-sekolah. "Namun tetap berpedoman pada kisi-kisi sekolah," ulasnya.

Disebutkan, beberapa pihak

yang mungkin punya kompetensi bisa datang dari para dosen, pakar pengamat pendidikan, atau para mahasiswa yang relevan dan membidangi soal. "Hal itu bisa saja, asal *screening*-nya harus ketat dan kualitasnya kuat juga objektif," paparnya. Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba juga sangsi dengan rilis yang disampaikan oleh Disdikpora. Menurut dia, belum sepenuhnya informasi yang disampaikan ke publik terkait bocornya soal

ujian literasi numerik. "Sehingga *puzzle-puzzle* yang belum utuh tersebut harus segera diungkap dan diusut tuntas," terangnya.

Kamba sendiri juga bertanya-tanya, apakah hanya satu guru saja atau ada pihak lain yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan ceroboh dan merugikan banyak siswa dan orang tua ini. Maka, perlu ditelusuri segera secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi.

Terutama soal nama guru

dan asal sekolah yang membocorkan soal. "Jika tidak segera dituntaskan, ini bisa menimbulkan bola liar dan muncul persepsi yang beragam dari masyarakat atas persoalan ini," tandasnya.

Sedang terkait nilai ASPD yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sistem penerimaan murid baru (SPMB), Yuliani mengaku menjadi buah simalakama. Dalam pandangannya saat ini, hal tersebut tetap perlu ada dan diterapkan. Meskipun ter-

jadi kebocoran soal.

Bukan tanpa sebab, Yuliani mengkhawatirkan jika persyaratan SPMB hanya didasari dari nilai rapor sekolah. Ia justru khawatir akan ada praktik kecurangan dari pihak sekolah, termasuk melakukan peningkatan nilai secara fiktif. "Kalau tidak ada ASPD, malah banyak sekolah nanti menaikan nilai semanya sendiri, ASPD ini harusnya jadi salah satu cara untuk menetralkan hal itu," ujarnya. (iza/pra/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005